

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

- Ahmad Yani. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Bahtiar Arif, dkk. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.
- Bastian Indra. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul.(2007). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah, edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim Abdul, Kusufi Syam. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawan, Deni. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ihyaul Ulum. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Kawedar, Warsito.dkk.(2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: UNDIP
- Kuncoro Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan daerah: Reformasi Perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan Deddi, dkk. (2007), *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo, P. Eko. (2009). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Rahman Herlina. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Sholeh, Chabib dan Suripto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.

Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sukestiyarno. (2014). *Statistika Dasar*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Sukirno Sadono. (2010). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunarto. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Amus Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.

Syarifin Pipin, Jubaedah Dedah. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Jurnal:

Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi. Jurnal Akuntansidan Keuangan Sektor Publik, Vol 08 No. 01. February 2007. BPFU UGM. Yogyakarta.

Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2004). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STEI No.2

Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.

Stungkir, Anggiat (2009). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal" (Studi Empiris Pada pemkot/Pemkab Sumatera Utara). Juli. Medan.

Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Keuangan No. 101 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.07/2011)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

Website:

www.kompas.com